

**KOMUNIKASI PEMERINTAHAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DENGAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI DESA BANJARAN KEC. MAJA KAB.
MAJALENGKA
PROV. JAWA BARAT**

Putri Nur Illahi S.
NPP. 32.0390

Asdaf Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: 32.0390@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Anwar Rosshad,
SH., M.Si.

ABSTRACT

Problem/Background(GAP): *Government communication between the Village Consultative Body (BPD) and the village head in Banjaran Village, Maja Subdistrict, Majalengka Regency, West Java Province has not been running optimally. This is reflected in the low attendance rate of BPD members at village deliberations, which only reached 53%, as well as in the rejection of several village development programs due to a lack of coordination and collaboration. In fact, effective communication between the two institutions is crucial for supporting the success of governance and village development. Purpose:* *The purpose of this research is to identify and describe the government communication between the Village Consultative Body and the village head in the implementation of governance in Banjaran Village, Maja Subdistrict, Majalengka Regency, West Java Province. Method:* *This research used qualitative methods with a descriptive approach. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation involving six informants. Result:* *Government communication between the Village Consultative Body and the village head has not been effective. Obstacles identified include the lack of regular coordination, limited access to governance information, low public awareness of participation, and differing interests between the two parties. Although communication occurs in both formal and informal ways, it has not yet succeeded in creating a harmonious synergy in village governance decision-making. Conclusion:* *Government communication between the BPD and the village head in Banjaran Village remains suboptimal due to inadequate information transparency, unstructured coordination, and low active community participation. There is a need for improvements in internal communication systems between institutions, as well as increased public awareness to ensure that government communication runs more effectively and supports participatory village development.*

Keywords: *Government communication, Village Consultative Body, Village head, coordination, community participation.*

ABSTRAK

Permasalahan/latar belakang (GAP): Komunikasi pemerintahan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa di Desa Banjaran Kec.Maja Kab. Majalengka Prov. Jawa Barat belum berjalan optimal. Hal ini tercermin dari rendahnya Tingkat kehadiran anggota BPD dalam musyawarah desa yang hanya mencapai 53%, serta masih adanya program Pembangunan desa yang tidak disetujui oleh BPD karena kurangnya koordinasi dan kolaborasi. Padahal, komunikasi yang efektif antara kedua lembaga tersebut sangat penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan desa. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan komunikasi pemerintahan Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Banjaran Kec. Maja Kab. Majalengka Prov. Jawa Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap enam informan. **Hasil/Temuan:** Komunikasi pemerintahan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan belum efektif. Hambatan yang ditemukan meliputi minimnya koordinasi rutin, keterbatasan akses terhadap informasi pemerintahan, rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat, serta perbedaan kepentingan antara kedua pihak. Meskipun terdapat beberapa bentuk komunikasi yang dilakukan secara formal dan informal, namun belum mampu menciptakan sinergi yang harmonis dalam pengambilan keputusan pemerintahan desa. **Kesimpulan:** Komunikasi pemerintahan antara BPD dengan Kepala Desa di Desa Banjaran masih belum optimal karena terkendala oleh kurangnya keterbukaan informasi, koordinasi yang tidak terstruktur, dan minimnya partisipasi aktif masyarakat. Perlu adanya perbaikan sistem komunikasi internal antar lembaga serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat agar komunikasi pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung pembangunan desa secara partisipatif.

Kata Kunci: Komunikasi pemerintahan, BPD, Kepala Desa, koordinasi, partisipasi masyarakat.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menganut sistem politik demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia melalui tiga aspek: kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi (Athahirah, 2022). Pemerintahan pada hakikatnya adalah proses interaksi yang tidak terlepas dari komunikasi antar pelaku dan institusi dalam mencapai tujuan bersama, sehingga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas hubungan dan koordinasi yang dibangun (Labolo, 2014). Pemerintahan desa adalah pelaksana urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa ialah Kepala Desa yang dibantu perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa merumuskan rencana pembangunan suatu desa berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, serta mengintegrasikan perencanaan tersebut dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota (Thekle, 2022). Komunikasi harus dilihat sebagai sesuatu yang konstitutif, berdasarkan perencanaan yang matang, implementasi yang cermat, dan penilaian yang berkelanjutan.

komunikasi antar manusia (*human communication*) yang terjadi dalam organisasi pemerintahan (Sarwani, 2021). Pemerintah berperan sebagai komunikator, sementara masyarakat berperan sebagai komunikan. Namun, dalam situasi tertentu, peran ini bisa berganti, di mana masyarakat juga dapat menjadi penyampai ide kepada pemerintah (Erliana, 2014). Salah satu elemen utama dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah komunikasi yang efektif antara unsur-unsur pemerintahan di tingkat desa. Komunikasi pemerintahan yang baik dapat menciptakan koordinasi yang harmonis, meningkatkan transparansi, memperkuat legitimasi pemerintah desa, serta mendorong partisipasi masyarakat (Lukas et al., 2020). Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada desa melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkatnya yang berkolaborasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan pemerintahan. BPD memiliki fungsi strategis sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam forum musyawarah desa (Roza & S, 2018).

Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, komunikasi antara BPD dengan kepala desa di beberapa wilayah belum berjalan optimal. Salah satu contoh nyata terjadi di Desa Banjaran, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Berdasarkan data tahun 2024, tingkat kehadiran anggota BPD dalam kegiatan musyawarah desa hanya mencapai 53%, menjadikan Desa Banjaran sebagai desa dengan tingkat partisipasi BPD terendah di antara 18 desa di Kecamatan. Ketidakhadiran ini berdampak langsung pada tidak tercapainya kuorum dalam forum musyawarah, serta melemahkan pengambilan keputusan dan perumusan program pembangunan desa. Berikut tabel rekap data presentasi kehadiran BPD dalam musyawarah desa tahun 2024 di Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.

NO	DESA	JUMLAH BPD	JUMLAH RAPAT	ANGKA KEHADIRAN		PRESENTASE KEHADIRAN
				TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ANGGRAWATI	5	12	60	58	97%
2	BANJARAN	5	15	75	40	53%
3	CENGAL	5	15	75	69	92%
4	CICALUNG	5	12	60	55	92%
5	CIEURIH	5	14	70	67	96%
6	CIHAUR	4	12	48	45	94%
7	CIPICUNG	5	10	50	48	96%
8	KERTABASUKI	5	15	75	74	99%
9	MAJA SELATAN	8	14	112	103	92%
10	MAJA UTARA	9	14	126	120	95%
11	MALONGPONG	5	14	70	65	93%
12	NUNUK BARU	7	15	105	94	90%
13	PAGERAJI	5	15	75	73	97%
14	PANIIS	5	14	70	67	96%
15	PASANGGRAHAN	5	15	75	72	96%

16	SINDANGKERTA	4	15	60	55	92%
17	TEGALSARI	5	12	60	54	90%
18	WANAHAYU	5	12	60	55	92%

Sumber: Data Absensi Rapat/Musyawah Desa di Kecamatan Maja, 2024

Berdasarkan tabel diatas kehadiran BPD dalam kegiatan musyawarah desa sangat penting untuk memastikan partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan yang demokratis. BPD bertugas untuk mengkoordinasikan musyawarah desa, memastikan semua warga desa dapat berpartisipasi. Kehadiran BPD membantu menciptakan suasana diskusi yang kondusif dan inklusif, di mana setiap suara dapat didengar. Anggota BPD adalah perwakilan dari masyarakat desa yang dipilih secara demokratis. BPD memiliki tanggung jawab untuk menampung dan menyampaikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat kepada pemerintah desa. Kehadiran mereka dalam musyawarah sangat penting untuk menjamin bahwa pandangan warga terwakili. Selain itu, dalam musyawarah, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. BPD memiliki hak suara yang sama dengan warga lainnya, sehingga kehadiran mereka sangat berpengaruh terhadap hasil keputusan yang diambil. Namun dalam kenyataannya, komunikasi pemerintahan antara BPD dan Kepala Desa di Desa Banjaran Kecamatan Maja belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran anggota BPD dalam kegiatan musyawarah desa yang rendah, yaitu hanya mencapai 53%. Angka tersebut berada jauh di bawah standar kehadiran yang umumnya menjadi prasyarat sahnya sebuah forum musyawarah desa, sehingga forum yang terbentuk seringkali tidak kuorum. Ketidakhadiran ini berdampak langsung pada proses pengambilan keputusan, penetapan program pembangunan, dan kolaborasi kelembagaan desa. Rendahnya partisipasi BPD tidak hanya menghambat kelancaran komunikasi internal pemerintahan desa, tetapi juga memperlihatkan lemahnya koordinasi yang berdampak pada legitimasi hasil musyawarah desa serta efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.

Selain itu, permasalahan terkait kurangnya partisipasi BPD dalam musyawarah yang berdampak terhadap beberapa penolakan yang diusulkan, seperti fenomena yang terjadi di Desa Banjaran Kecamatan Maja ketidakharmonisan antara BPD dengan kepala desa yang biasa terjadi yaitu berbentuk perbedaan pendapat dalam bentuk kepentingan, ide, dan pemahaman. Berikut tabel yang berisikan beberapa program yang tidak mendapat kesepakatan dari anggota BPD

No.	Program	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1.	Pembangunan saluran irigasi cilimus	Tidak disetujui
2.	Pembangunan tps blok sukaasih	Tidak disetujui
3.	Pembangunan gada-gada gapura desa.	Tidak disetujui

Berdasarkan tabel diatas ketidaksetujuan BPD terhadap program-program tertentu dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Jika usulan yang dianggap penting oleh masyarakat tidak disetujui, hal ini dapat menciptakan ketegangan antara pemerintah desa dan warga. Masyarakat mungkin merasa aspirasi mereka diabaikan, yang berpotensi mengurangi kepercayaan mereka terhadap pemerintah desa dan BPD sebagai perwakilan mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“KOMUNIKASI PEMERINTAHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA BANJARAN KEC. MAJA KAB. MAJALENGKA PROV. JAWA BARAT”**.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian mengenai komunikasi pemerintahan di tingkat desa telah banyak dilakukan, terutama dengan fokus pada hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam konteks sosialisasi program, pelaksanaan pembangunan, serta penguatan partisipasi publik. Sebagai contoh (Lukas et al., 2020) meneliti bagaimana komunikasi pemerintahan berperan dalam membangun citra kepemimpinan, sementara (Artha & Alvin, 2024) menyoroti pola komunikasi antara pemerintah desa dan BPD dalam penyusunan RKPDes. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menekankan pada komunikasi satu arah atau komunikasi vertikal antara pemerintah dan warga desa.

Kesenjangan yang muncul adalah masih terbatasnya kajian yang secara khusus menelaah dinamika komunikasi horizontal atau sejajar antara dua lembaga pemerintahan desa yang memiliki kedudukan formal setara, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa. Padahal, komunikasi antar kedua institusi ini sangat krusial dalam mendukung efektivitas perumusan kebijakan desa, pelaksanaan musyawarah, dan pengambilan keputusan pembangunan. Minimnya perhatian akademik terhadap pola komunikasi, hambatan, dan bentuk kolaborasi antara BPD dan kepala desa menyebabkan celah pengetahuan dalam memahami kualitas tata kelola pemerintahan desa secara menyeluruh.

Secara kontekstual, belum ditemukan penelitian yang mengangkat permasalahan rendahnya kehadiran BPD dalam forum musyawarah desa seperti yang terjadi di Desa Banjaran, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, di mana tingkat kehadiran BPD hanya mencapai 53% pada tahun 2024. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya komunikasi kelembagaan, penolakan beberapa program pembangunan, serta lemahnya legitimasi proses musyawarah desa. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan gambaran yang komprehensif tentang bentuk, kualitas, serta faktor penghambat komunikasi pemerintahan antara BPD dan Kepala Desa, khususnya di Desa Banjaran.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai komunikasi pemerintahan, khususnya di tingkat desa, telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Penelitian pertama dilakukan oleh (Lukas et al., 2020) yang meneliti komunikasi pemerintahan dalam membangun citra kepemimpinan di Desa Ponompiaan, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak efektif menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hal ini dipicu oleh kurangnya transparansi, informasi yang tidak konsisten, dan tidak adanya pelaporan kemajuan program, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap kepemimpinan desa. Penelitian kedua dilakukan oleh (Artha & Alvin, 2024) yang membahas komunikasi pemerintahan dalam penyusunan RKPDes di Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menemukan bahwa komunikasi antara pemerintah desa dan BPD bersifat kemitraan dan telah berjalan cukup baik dalam menetapkan RKPDes menjadi Peraturan Desa. Namun, terdapat hambatan berupa pola

komunikasi satu arah, kurangnya pemahaman BPD terhadap fungsi dan tugasnya, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peran BPD dalam proses pemerintahan desa. Penelitian ketiga oleh di Desa Ngadirgo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang meneliti partisipasi BPD dalam perumusan kebijakan desa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keterlibatan BPD masih bersifat simbolik, di mana komunikasi antara kepala desa dan BPD tidak berlangsung secara setara. Banyak keputusan yang diambil tanpa musyawarah yang cukup, sehingga kebijakan desa cenderung bersifat top-down dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana pada penelitian yang diteliti oleh peneliti ini berfokus pada dinamika komunikasi pemerintahan di tingkat desa yang belum banyak dikaji secara mendalam, terutama dalam konteks Desa Banjaran. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan pada peran BPD atau Kepala Desa secara terpisah, tanpa menyoroti hubungan komunikatif keduanya dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan komunikasi pemerintahan untuk menganalisis interaksi antara BPD dan Kepala Desa. Hal ini memberikan perspektif baru dalam memahami efektivitas kerja sama antar lembaga desa melalui jalur komunikasi, yang selama ini belum menjadi fokus utama dalam kajian pemerintahan desa. Penelitian ini juga menggunakan teori strategi yang berbeda dengan lima penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini menggunakan teori komunikasi pemerintahan dari Abidin (2016). Serta objek yang dilakukan untuk meneliti pada penelitian sebelumnya fokus pada komunikasi internal BPD dengan kepala desa sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh peneliti berfokus pada komunikasi BPD dengan kepala desa serta partisipasi dari masyarakat.

1.5 Tujuan.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan mendeskripsikan komunikasi pemerintahan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Banjaran Kec. Maja Kab. Majalengka Prov. Jawa Barat serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor menghambat komunikasi pemerintahan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Banjaran Kec. Maja Kab. Majalengka Prov Jawa Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara mendalam komunikasi pemerintahan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Banjaran, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap fakta, peristiwa, dan dinamika sosial-politik yang terjadi secara alami di lapangan (Sugiyono, 2016). Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu secara aktual. Pendekatan ini lebih menekankan pada proses dan makna yang tidak dapat diukur secara ketat dengan angka, serta dilakukan secara alami dalam

konteks yang aktual (Nurdin & Hartati, 2019) . Dalam melakukan wawancara, ada 6 (enam) orang yang dijadikan informan yang terdiri dari kepala desa, ketua BPD, sekretaris desa, anggota BPD dan dua masyarakat. metodologi kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami tindakan sosial sebagai praktik yang bermakna, melekat, dan berada dalam konteks tertentu, bukan sebagai perilaku yang terpisah dan terlepas dari konteksnya

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis komunikasi pemerintahan Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Banjaran Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat menggunakan teori (Abidin, 2016) yang menyatakan komunikasi pemerintahan memiliki dua dimensi, yakni komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Penjelasan mengenai hal tersebut akan dibahas pada subbab berikut:

3.1 Komunikasi Internal

1. Keterbukaan informasi

Keterbukaan Informasi merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis. Dalam konteks pemerintahan desa, keterbukaan informasi menjadi penting untuk membangun transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa, keterbukaan informasi menjadi jembatan komunikasi yang menentukan kualitas hubungan kelembagaan serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Kemampuan adaptasi dan keandalannya ditegaskan oleh kemampuannya untuk beroperasi di berbagai pita frekuensi, yang memenuhi berbagai kebutuhan komunikasi (Manikandan, 2025).

Dalam pelaksanaannya, kepala desa memiliki peran sentral sebagai penyedia informasi bagi BPD dan masyarakat. Informasi yang disampaikan meliputi program kerja, kegiatan pembangunan, penggunaan anggaran, serta laporan pertanggungjawaban tahunan. Keterbukaan ini diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat, melalui BPD, untuk memberikan masukan atau pengawasan terhadap kebijakan dan keputusan pemerintah desa.

BPD, sebagai lembaga representasi masyarakat, memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh informasi dari kepala desa. Dalam forum-forum resmi seperti musyawarah desa, BPD berperan untuk menyampaikan aspirasi warga serta menyuarakan keberatan atau pendapat terhadap rencana-rencana pembangunan. Tanpa informasi yang memadai, peran BPD dalam mengawasi, menyetujui, maupun menolak program desa akan menjadi tidak efektif.

Namun, kenyataan di Desa Banjaran menunjukkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi belum berjalan optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Banjaran, komunikasi antara kepala desa dan BPD memang tetap ada, namun tidak semua anggota BPD aktif berpartisipasi. Beberapa anggota BPD tidak sepaham dengan kepemimpinan kepala desa saat ini sehingga enggan terlibat dalam forum musyawarah atau kegiatan kelembagaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi sangat dipengaruhi oleh relasi personal dan dinamika politik lokal.

Kepala desa Banjaran juga menyampaikan bahwa keterbatasan sarana prasarana menjadi penghambat dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Misalnya, situs web desa belum tersedia karena tidak ada tenaga ahli yang mampu mengelolanya, dan papan pengumuman belum difungsikan kembali karena rusak dan belum diperbaiki. Kondisi ini

menambah tantangan dalam memastikan bahwa informasi desa bisa diakses secara luas dan cepat oleh warga maupun oleh BPD.

Meskipun secara prosedural informasi tetap disampaikan kepada BPD, kenyataan menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi dalam forum musyawarah desa. Data menunjukkan bahwa kehadiran BPD dalam musyawarah hanya sebesar 53%, terendah di antara 18 desa di Kecamatan Maja. Hal ini berdampak pada tidak tercapainya kuorum dalam rapat dan melemahkan proses pengambilan keputusan yang seharusnya dilakukan secara demokratis dan partisipatif.

Rendahnya kehadiran BPD juga berpengaruh pada kurangnya respon terhadap informasi yang diberikan oleh kepala desa. Beberapa program pembangunan yang diusulkan, seperti pembangunan saluran irigasi Cilimus, TPS Blok Sukaasih, dan gapura desa, tidak disetujui oleh sebagian anggota BPD. Menurut hasil wawancara, penolakan ini lebih disebabkan oleh perbedaan kepentingan dan rivalitas politik ketimbang substansi program itu sendiri.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya membutuhkan komitmen dari kepala desa sebagai komunikator utama, tetapi juga kesediaan BPD untuk terlibat aktif sebagai komunikan. Ketika komunikasi tidak direspons dengan baik, maka tujuan dari transparansi menjadi kurang bermakna. Informasi yang hanya disampaikan secara satu arah tidak akan menciptakan akuntabilitas yang sejati.

Dalam perspektif teori komunikasi pemerintahan oleh Abidin (2016), komunikasi yang baik haruslah dua arah, terbuka, jujur, dan membangun dialog antara unsur pemerintahan. Artinya, keterbukaan informasi tidak sekadar menyampaikan laporan, tetapi menciptakan ruang interaksi antara kepala desa dan BPD untuk membahas substansi secara bersama-sama. Jika komunikasi hanya bersifat formal tanpa partisipasi aktif, maka esensi keterbukaan akan tereduksi menjadi sekadar kewajiban administratif.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi di Desa Banjaran telah dijalankan secara prosedural, namun belum menyentuh aspek substansial yang mencerminkan komunikasi timbal balik antara kepala desa dan BPD. Tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis seperti fasilitas informasi, tetapi juga menyangkut faktor relasi sosial dan politik internal yang menghambat sinergi antar lembaga desa. Oleh karena itu, peningkatan kualitas keterbukaan informasi perlu disertai dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan etika komunikasi antar pihak yang terlibat.

2. Koordinasi dan kolaborasi

Koordinasi dan kolaborasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala desa merupakan elemen penting dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien. Keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi; kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan dan BPD sebagai pengawas serta penyalur aspirasi masyarakat. Koordinasi memungkinkan terciptanya pemahaman yang selaras terkait kebijakan, sementara kolaborasi membuka ruang kerja sama yang konstruktif dalam implementasi program desa. Menurut pendekatan Analysis of Alternatives (AoA), sebelum mengambil keputusan penting dalam sistem pemerintahan, diperlukan identifikasi masalah, evaluasi alternatif, serta pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung koordinasi dan transparansi antar pihak yang terlibat (Arisal, 2025).

Namun, di Desa Banjaran, implementasi koordinasi dan kolaborasi ini mengalami hambatan. Salah satu kendala utama adalah ketidakharmonisan hubungan antara kepala desa dan sebagian anggota BPD yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan pribadi maupun politik. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat kehadiran anggota BPD dalam rapat-rapat resmi desa. Dari enam rapat yang direncanakan sepanjang tahun 2024, tidak satu pun dihadiri oleh seluruh anggota BPD, sehingga mayoritas rapat tidak memenuhi kuorum. Seperti pada tabel berikut

Tabel 3.1
Rekapitulasi Kehadiran Rapat Koordinasi BPD dengan Kepala Desa Banjaran Tahun 2024

No	Tanggal Rapat	Agenda rapat	Kehadiran Kepala Desa	Kehadiran Ketua BPD	Kehadiran Anggota BPD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	16 Januari 2024	Musyawarah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan apbdes Banjaran Tahun Anggaran 2023	Hadir	Hadir	2 dari 4 orang hadir	Rapat tidak kuorum
2.	17 Januari 2024	Musyawarah Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa	Hadir	Tidak Hadir	2 dari 4 orang hadir	Rapat tidak kuorum
3.	12 Februari 2024	Musyawarah Penjabaran Perubahan APBDes Tahun 2024	Hadir	Hadir	2 dari 4 orang hadir	Rapat tidak kuorum
4.	06 Maret 2024	Koordinasi pemerintah desa dengan BPD dan lembaga desa	Hadir	Hadir	2 dari 4 orang hadir	Rapat tidak kuorum
5.	06 Juni 2024	Musyawarah pembentukan tim penyusunan perubahan RPJMD tahun 2020-2027, perubahan RKP Desa 2024 dan RKP Desa tahun 2025	Hadir	Hadir	3 dari 4 orang hadir	Rapat tidak kuorum
6.	03 Juli 2024	Pembentukan panitia pelaksana musyawarah dusun pelaksanaan pengkajian keadaan desa dalam rangka penyusunan RPJMD tahun 2020-2027	Hadir	Tidak Hadir	1 dari 4 orang hadir	Rapat dibatalkan karena minim kehadiran

Data absensi serta pernyataan dari Sekretaris Desa dan Ketua BPD menguatkan bahwa koordinasi internal di tubuh BPD pun lemah. Tidak adanya rapat internal BPD serta sikap acuh dari sebagian anggotanya menjadi penghalang serius dalam membangun sinergi kelembagaan. Ketidakhadiran ini tidak hanya berdampak pada hubungan antar lembaga, tetapi juga pada kualitas pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat. Ketidakharmonisan antara kepala desa dan BPD yang dipicu oleh kepentingan pribadi akan

berdampak buruk pada kelangsungan program desa, menurunkan partisipasi masyarakat, dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan desa (Akbar, 2024).

Pemanfaatan teknologi informasi sebenarnya dapat menjadi solusi untuk memperkuat koordinasi, namun belum dapat diterapkan secara optimal di Desa Banjaran. Sebagian besar anggota BPD berusia lanjut dan belum akrab dengan teknologi digital, sehingga komunikasi masih dilakukan secara konvensional. Hal ini menghambat percepatan informasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa.

3.2 Komunikasi Eksternal

Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Proses penyusunan dan penetapan peraturan desa harus melibatkan partisipasi aktif dari Badan (Sa'da, 2020). Permusyawaratan Desa sebagai representasi masyarakat Melalui partisipasi, BPD dapat menyerap dan mewakili aspirasi warga yang kemudian disampaikan kepada kepala desa agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran. Keterlibatan masyarakat juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan menghasilkan keputusan yang lebih inklusif serta diterima oleh berbagai pihak. Selain itu, partisipasi aktif mendorong pembangunan berkelanjutan karena mempertimbangkan kebutuhan masa kini dan dampak jangka panjang. Dalam forum seperti musyawarah desa, masyarakat tidak hanya mengawasi, tetapi juga terlibat langsung dalam perumusan kebijakan sesuai kebutuhan lokal.

Partisipasi masyarakat Desa Banjaran berjalan cukup baik dilihat dari masyarakat yang sering dilibatkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh desa. Ketika aspirasi masyarakat disampaikan secara terbuka dan ditindaklanjuti, hal ini mendorong akuntabilitas dari pihak pemerintah desa. Masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja kepala desa berdasarkan respons terhadap aspirasi mereka.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi pemerintahan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa di Desa Banjaran Kecamatan Maja belum mencapai efektivitas yang diharapkan. Salah satu indikator utama dari permasalahan ini adalah rendahnya partisipasi BPD dalam forum musyawarah desa, yang tercermin dari tingkat kehadiran hanya sebesar 53% pada tahun 2024. Angka ini merupakan yang terendah di antara 18 desa dalam lingkup Kecamatan Maja, dan berdampak serius pada legalitas serta kualitas keputusan yang diambil dalam forum musyawarah. Minimnya kehadiran tersebut tidak hanya mencerminkan lemahnya komitmen institusional, tetapi juga menunjukkan adanya hambatan komunikasi internal yang sistemik. Berdasarkan teori komunikasi pemerintahan menurut Abidin (2016), komunikasi pemerintahan mencakup dimensi internal dan eksternal yang seharusnya saling mendukung dalam menciptakan tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Namun dalam kasus ini, dimensi internal yakni komunikasi antara BPD dan Kepala Desa belum berjalan secara sinergis.

Lebih lanjut, kendala utama yang ditemukan meliputi kurangnya keterbukaan informasi dari pihak kepala desa, absennya mekanisme koordinasi yang terstruktur dan rutin, serta ketidaksesuaian persepsi dan kepentingan antara kedua lembaga. Kepala desa belum secara optimal menyampaikan informasi mengenai program kerja, penggunaan anggaran, dan rencana pembangunan kepada BPD. Padahal, BPD sebagai lembaga representatif masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh dan menanggapi informasi tersebut guna menyampaikan aspirasi masyarakat. Kurangnya informasi ini berdampak pada rendahnya legitimasi BPD dalam proses pengambilan keputusan, sehingga

memicu penolakan terhadap beberapa program pembangunan seperti pembangunan saluran irigasi dan TPS yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kurang dikomunikasikan sebelumnya. Dalam situasi ini, komunikasi tidak lagi menjadi sarana penyatuan kekuatan antarlembaga sebagaimana yang diidealkan oleh Abidin, melainkan justru menjadi titik rawan konflik dan ketidakharmonisan kelembagaan.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam musyawarah desa juga menjadi faktor eksternal yang memperburuk komunikasi pemerintahan. Minimnya partisipasi publik menyebabkan proses musyawarah kehilangan fungsi deliberatifnya sebagai ruang aspirasi bersama. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan komunikasi tidak hanya terjadi secara institusional antara BPD dan Kepala Desa, tetapi juga melibatkan konteks sosial yang lebih luas di tingkat masyarakat. Maka dari itu, upaya untuk meningkatkan kualitas komunikasi pemerintahan perlu dilakukan secara menyeluruh—tidak hanya melalui penguatan struktur koordinasi antar lembaga desa, tetapi juga melalui pendekatan edukatif kepada masyarakat agar lebih memahami peran dan fungsi partisipatif mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya membangun sistem komunikasi pemerintahan yang terbuka, responsif, dan berorientasi pada konsensus, sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Mengacu hasil penelitian ini mengenai komunikasi pemerintahan Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Banjaran Kec. Maja Kab. Majalengka Prov. Jawa Barat dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemerintahan Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah baik, hal ini dilihat berdasarkan 3 (tiga) indikator komunikasi pemerintahan menurut Abidin (2016) yakni keterbukaan informasi, koordinasi dan kolaborasi, serta partisipasi masyarakat. Dua dari tiga indikator sudah baik. Sedangkan pada indikator koordinasi dan kolaborasi masih dianggap kurang.

komunikasi strategis dalam organisasi pemerintahan menuntut adanya sinergi dan legitimasi antar pihak yang terlibat. Dalam konteks pemerintahan desa, kegagalan menciptakan komunikasi yang transparan dan kolaboratif antara BPD dan kepala desa berpotensi mengganggu upaya pencapaian tujuan pembangunan desa secara partisipatif dan inklusif, serupa dengan tantangan koordinasi vertikal dan horizontal yang dihadapi oleh MKN selama penanganan COVID-19 (Rahim et al., 2025). Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi komunikasi pemerintahan antara BPD dengan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa yaitu:

- a. Pola komunikasi seperti keterbatasan dalam keterbukaan informasi yang disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.
- b. Kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap peran mereka dalam sistem pemerintahan desa serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi BPD juga menyebabkan kurangnya partisipasi serta dukungan dalam proses pemerintahan desa.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian ini juga menghadapi keterbatasan dalam partisipasi aktif dari seluruh anggota BPD. Sebagian anggota BPD tidak bersedia diwawancarai secara mendalam karena ketidakharmonisan hubungan dengan pemerintah desa, sehingga data yang diperoleh kurang mewakili seluruh perspektif internal BPD. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).**

Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian pada permasalahan yang sama mampu memperluas cakupan lokus penelitian ke beberapa desa dengan karakteristik sosial, budaya, dan tingkat partisipasi masyarakat yang berbeda. Hal ini ditujukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika komunikasi pemerintahan di tingkat desa. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam faktor-faktor psikologis, sosial, dan struktural yang memengaruhi partisipasi anggota BPD, serta menelusuri bentuk-bentuk strategi komunikasi yang efektif dalam membangun hubungan kerja yang harmonis dan produktif antara BPD dengan kepala desa.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan kepada Pemerintah Desa Banjaran Kec. Maja Kab. Majalengka Prov. Jawa Barat atas dukungan dan fasilitasi selama proses penelitian ini berlangsung. Bantuan dan kerja sama yang diberikan sangat berarti dalam kelancaran pengumpulan data serta pelaksanaan studi ini. Semoga hubungan baik ini terus terjalin demi kemajuan Bersama.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Y. Z. (2016). *Komunikasi Pemerintahan : Filosofi, Konsep, Dan Aplikasi*. Bandung : Pustaka Setia, 2016.
- Akbar, A. (2024). *Perseteruan Kepala Desa dan BPD: Dampak yang merugikan masyarakat*. <https://desamerdeka.id/perseteruan-kepala-desa-dan-bpd-dampak-yang-merugikan-masyarakat>
- Arisal, A. (2025). *Analysis of alternatives methodology for large-scale information system implementation*. *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics* No Title. 665–675. <https://doi.org/https://doi.org/10.11591/eei.v14i1.7800>
- Artha, L., & Alvin, D. (2024). *Komunikasi Pemerintahan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 Di Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang Program Studi Politik Indonesia Terapan*. <http://eprints.ipdn.ac.id/17987/>
- Athahirah, A. U. (2022). The Improvement Strategies Of Political Participation For Novice Voters In Purwakarta Regency. *Jwp (Jurnal Wacana Politik)*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.36776>
- Erliana, H. (2014). Paradigma Komunikasi Pemerintahan. *Jurnal Komunikasi Pemerintahan*, 54. <https://www.coursehero.com/file/61639298/IPEM4319-M11pdf/>
- Labolo, Muhadam (2014) *Memahami Ilmu Pemerintahan (Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya)*. Rajawali Pers, Jakarta.. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/799>
- Lukas, K., Pasoreh, Y., & Golung, A. M. (2020). Peran Komunikasi Pemerintahan Dalam membangun Citra Kepemimpinan Di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang-Mongondow. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(1), 1–23. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/27109>
- Manikandan, M. (2025). *Enhanced Performance of Hybrid Dielectric Resonator Antenna with Hexagonal Ring Patch and Ground Slot for Multiband Operation in 5G Wireless Communication*. *Tehnicki Vjesnik*. 313–318. <https://doi.org/https://doi.org/10.17559/TV-20240108001254>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL* (Lutfiah (ed.)). Media Sahabat Cendekia. http://eprints2.ipdn.ac.id/376/2/ISI_BUKU_METODOLOGI_PENELITIAN_SOSIAL.pdf
- Rahim, iti S. I., Huda, M. I. M., & Moorthy, R. (2025). *Cabaran Komunikasi Majelis Keselamatan Negara (MKN) dalam Menyelaras Pandemi COVID-19: Analisis*

- Tripartite Model of National Security (3Ps / Model 3P)*. 41, 52–69.
<https://doi.org/https://doi.org/10.17576/JKMJC-2025-4101-04>
- Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606–624. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>
- Sa'da, N. (2020). *Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Prmusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala*. <https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/14984>
- Sarwani, S. (2021). Pelayanan Komunikasi Pemerintahan Dalam Pemberitaan Kebijakan Pemerintah Daerah Kepada Stakeholder di Kalimantan Selatan. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 118–127. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v1i2.106>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Thekle, S. W. (2022). *Pemerintah Desa Dan Pemerintahan Desa*. <https://dero.desa.id/artikel/2022/12/25/pemerintah-des-a-1>



